

Lampiran Flyer

Majelis Hukum dan HAM
 Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Bidang Hukum dan HAM
 Pimpinan Daerah Pemuda
 Muhammadiyah Kota Surakarta

www.pdih.ums.ac.id

20 Seminar Nasional 23 dan Call for Paper

POLITIK HUKUM DAN DEMOKRASI MENUJU PEMILU 2024

Tanggal
22 Juni 2023
(Pukul. 09.00 WIB s.d. selesai)

Tempat
Online Zoom

Sub Tema Call for Paper :

- Demokrasi dan HAM
- Politik Hukum Pemilu
- Partai Politik dan Pemilu
- Korupsi dan Pemilu
- Pemilu dan Keadilan Agraria
- Green Politics
- Politik Lokal
- Manajemen Pemilu
- Pemilu Perspektif Islam
- Tema Demokrasi dan Pemilu Lainnya

Prof. Dr. Ni'matul Huda,
 S.H., M.Hum.
Guru Besar Universitas Islam Indonesia

Chusnul Mar'iyah, Ph.D
Doktor Pasifik Universitas Indonesia

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta

Moh. Indra Bangsawan,
 S.H., M.H.
Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta

Saepul Rochman, S.H., M.H.
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UMS

Biaya Pendaftaran :

- Peserta (*non-paper*) : Free/Gratis
- Pemakalah Umum : IDR 300.000,-
- Pemakalah Mahasiswa : IDR 150.000,-

Pembayaran :

6013114377
 a.n. PDIH UMS

Tanggal Penting :

- Submit Full Paper : 15 Mei - 15 Juni 2023
- Notifikasi Full Paper Acceptance : 17 Juni 2023
- Pembayaran Final Registration : 19 Juni 2023
- Pelaksanaan Seminar Call for Paper : 22 Juni 2023
- Pengumuman Publikasi : 22 Juli 2023

Publikasi :

- National e-Proceedings (ISSN)
- Jurnal *Jurisprudence* Sinta 2 (selected paper)
- Jurnal *Law and Justice* Sinta 4 (selected paper)
- Jurnal *Trancendental* Sinta 4 (selected paper)
- Journal Indonesian Journal of Legal Thought* (selected paper)

DAFTAR SEKARANG

hukumtransendental.ums.ac.id

PK IMM Ahmad Dahlan
 Universitas Muhammadiyah Surakarta

OFFICIAL INSTAGRAM
 @pdih.ums

CONTACT US
 0819-1639-1087 (MAHENDRA)
 0878-7785-0642 (CHARIZA)
 0813-6322-0765 (SAMBI)

Lampiran Dokumentasi



PDIHnews

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan Seminar Nasional & Call for Paper bekerjasama dengan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta.

Seminar Nasional PDIH UMS 2023 yang diadakan, Kamis (22/6) itu dilangsungkan secara hybrid di Ruang Kuliah S3 Ilmu Hukum Gedung Pascasarjana UMS dan zoom meeting bertema, "Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024".

Seminar tersebut menghadirkan tiga pemateri ahli, yakni : Prof., Dr., Absori, S.H., M.Hum dari UMS Surakarta, Prof., Dr., Ni'matul Huda, S.H., M.Hum dari UII Yogyakarta, dan Chusnul Mar'iyah, Ph.D dari Universitas Indonesia.



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.
Reynal Falah, S.Pd
Moh. Indra Bangawan, S.H., M.H.

pmb.ums.ac.id *Normatif-Empiris-Transendental* @pdih.ums



PDIHnews


Seminar yang diadakan oleh PDIH UMS tahunan ini mengangkat tema mengenai kepelembuan. Kali ini, pemateri memaparkan tentang Pemilu dalam perspektif Hukum Tata Negara, Pemilu dan Demokrasi dalam perspektif Politik Hukum, dan Pemilu dalam bingkai filsafat.

Prof. Ni'matul Huda dalam diskusinya menyimpulkan bahwa "Harus diadakan jaminan bahwa hukum itu dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, difafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)." Ujaranya.



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER
"Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024"
Surakarta, 22 Juni 2023
NARASUMBER


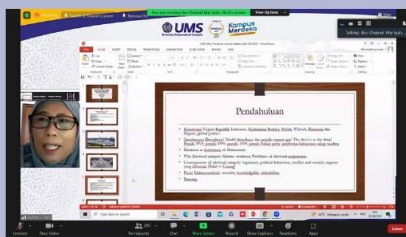
pmb.ums.ac.id *Normatif-Empiris-Transendental* @pdih.ums



PDIH_{news}

Chusnul Mar'iyah, Ph.D dalam diskusinya menekankan perlunya menghadirkan integritas kepemimpinan bukan dari elektabilitas tapi yang utama adalah moralitas atau etika; knowledgeable terhadap kedaulatan bangsa dan permasalahan bangsa, memahami amanah konstitusi; elektabilitas? Kita hanya wajib bergerak menjemput rizki jabatan, rizki kemenangan, yang menentukan laa haula wala kuwata illa billah bila kita semua percaya dengan rukun iman dalam Islam tentang qadha dan qadar)." Ujarnya.

Pembicara terakhir disampaikan oleh Prof. Absori yang mana beliau menekankan bahwa "Sege nap komponen bangsa, termasuk Muhammadiyah berkepentingan untuk mengingatkan pentingnya melakukan perubahan sistem Pemilu yang didasarkan pada hukum responsif dengan menyerap sebanyak mungkin aspirasi dan keinginan dan cita-cita mulia sege nap lapisan masyarakat".

pmb.ums.ac.id
Normatif-Empiris-Transendental
@pdih.ums



PDIH_{news}

Prof. Absori selaku Kaprodi S3 Ilmu Hukum mengatakan bahwa kegiatan diskusi ini ditujukan untuk menambah wawasan para akademisi dan masyarakat luas tentang Kepemiluan dengan turut mengundang para peneliti terkait untuk mempresentasikan temuannya dalam sesi Call for Paper.

"Kegiatan ini sebenarnya untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa atau akademisi, tidak hanya UMS tapi masyarakat luas, karena ini menyangkut Kepemiluan" Ujarnya.

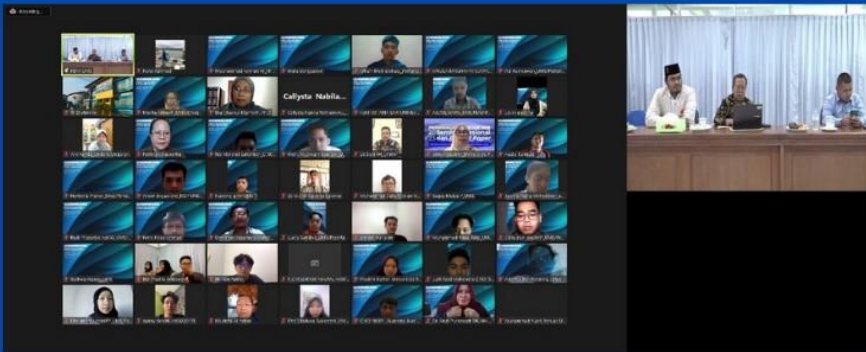
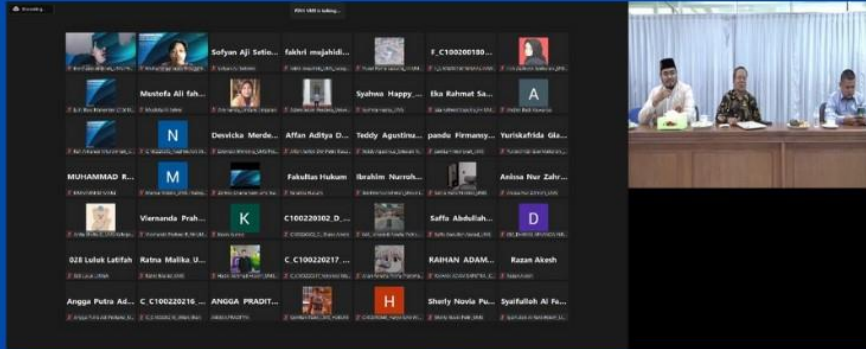
Dia juga menjelaskan pandangan Muhammadiyah bahwa perlu adanya pengontrolan mekanisme proses dan produk legislas i sistem Pemilu berupa peraturan pemerintah agar tidak terjebak pada kepentingan oligarkhi, monolitik dan tertutup dari aspirasi masyarakat luas.




pmb.ums.ac.id
Normatif-Empiris-Transendental
@pdih.ums



PDIHnews



D
O
K
U
M
E
N
T
A
S
I

pmb.ums.ac.id *Normatif-Empiris-Transendental* @pdih.ums

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

PDIH UMS 2023

“POLITIK HUKUM DAN DEMOKRASI
MENUJU PEMILU 2024”

